e-ISSN 2775-8869
p-ISSN 2776-0243

Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 6, Nomor 1, Maret 2026; hh. 61-67

KRISIS POLITIK INDONESIA TAHUN 1965: ANALISIS SEJARAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS NASIONAL

Sinta Prahastini[1], Bahri[2]
[1,2]Universitas Negeri Makassar
Email Korespondensi: sintaprahastini.s22025@student.unm.ac.id

Diterima: 12 Mei 2026 Direvisi: 17 Mei 2026 Disetujui: 15 Juni 2026

ABSTRACT

The 1965 Indonesian political crisis marked a major turning point in the country's political development, profoundly reshaping its governance and national stability. This study aims to analyze the causes, dynamics, and implications of the 1965 political crisis for Indonesia's national stability. The study employed the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources included government archives, official state documents, presidential speeches, and the Supersemar document, while secondary sources comprised scholarly books, journal articles, and previous studies on the 1965 political crisis. The findings indicate that the crisis resulted from the interaction of political rivalry among competing elites, ideological polarization, economic deterioration, and Cold War geopolitical dynamics. The 30 September Movement represented the culmination of these tensions and accelerated the transition of power from the Old Order to the New Order. The crisis subsequently transformed Indonesia's political system through political restructuring, the expansion of military influence, and the institutionalization of national stability as the primary governance paradigm. At the same time, it generated enduring consequences, including restrictions on democratic participation, collective social trauma, and unresolved challenges to reconciliation. Overall, the 1965 political crisis was a multidimensional historical event that fundamentally shaped Indonesia's political trajectory and remains significant for understanding the relationship between political stability, democracy, and historical reconciliation.
***Keywords**: 1965 political crisis; historical method; Indonesia; national stability; New Order.*

PENDAHULUAN

Stabilitas nasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa karena menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, integrasi sosial, dan pembangunan nasional. Dalam perspektif sejarah politik, stabilitas suatu negara sering kali dibentuk melalui dinamika krisis politik yang mengubah konfigurasi kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, dan arah kebijakan nasional. Krisis politik umumnya dipicu oleh interaksi kompleks antara konflik ideologi, persaingan elite politik, kelemahan institusi negara, serta pengaruh lingkungan internasional, sehingga menghasilkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sistem politik suatu bangsa (Crouch, 1978; Feith, 2007).

Salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia adalah krisis politik tahun 1965. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, tetapi juga mengawali lahirnya Orde Baru yang membentuk orientasi politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade (Maksum & Bustami, 2014). Berbagai kajian menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi Gerakan 30 September (G30S), melainkan merupakan akumulasi dari polarisasi ideologi, persaingan antara Presiden Soekarno, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta memburuknya kondisi ekonomi nasional pada akhir masa Demokrasi Terpimpin (Feith, 2007; Hati & Ginting, 2022). Situasi tersebut semakin diperumit oleh konteks geopolitik Perang

Dingin yang menempatkan Indonesia sebagai arena persaingan pengaruh antara blok Barat dan blok Timur (Maksum & Bustami, 2014).

Krisis politik 1965 membawa implikasi yang melampaui pergantian rezim pemerintahan. Pada masa Orde Baru, konsep stabilitas nasional dijadikan landasan utama pembangunan melalui penguatan birokrasi, penyederhanaan sistem kepartaian, pembatasan aktivitas politik, serta penguatan peran militer melalui doktrin Dwifungsi ABRI (Crouch, 1978). Kebijakan tersebut berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif kondusif bagi pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama memunculkan kritik karena berlangsung melalui kontrol politik yang ketat dan pembatasan ruang demokrasi (Bourchier, 2015; Rajab, 2022). Selain itu, peristiwa 1965 juga meninggalkan dampak sosial berupa trauma kolektif, stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, serta pembentukan narasi sejarah resmi yang memengaruhi memori kolektif masyarakat Indonesia hingga era Reformasi (Heryanto, 1999; Robinson, 2018; Wulandari, 2020).

Meskipun kajian mengenai peristiwa 1965 telah berkembang secara luas, sebagian besar penelitian berfokus pada kronologi Gerakan 30 September, keterlibatan aktor politik dan militer, pelanggaran hak asasi manusia, maupun transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto (Feith, 2007; Hati & Ginting, 2022; Robinson, 2018). Kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara krisis politik 1965 dengan pembentukan paradigma stabilitas nasional sebagai fondasi sistem politik Orde Baru masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara krisis politik, rekonstruksi kekuasaan negara, dan pembentukan konsep stabilitas nasional merupakan aspek penting untuk memahami perkembangan politik Indonesia secara historis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang, dinamika, dan implikasi krisis politik Indonesia tahun 1965 terhadap pembentukan stabilitas nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian historiografi politik Indonesia dengan memberikan analisis yang lebih integratif mengenai hubungan antara krisis politik, transformasi kekuasaan, dan konstruksi stabilitas nasional sebagai salah satu fondasi perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) untuk merekonstruksi dan menganalisis krisis politik Indonesia tahun 1965 serta implikasinya terhadap stabilitas nasional. Metode ini dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1969; Kuntowijoyo, 2005; Sjamsuddin, 2019). Pada tahap heuristik, peneliti menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan, meliputi arsip pemerintah Republik Indonesia, dokumen resmi negara, pidato Presiden Soekarno, dokumen militer, surat kabar dan majalah terbitan 1965-1967, serta berbagai buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas Gerakan 30 September (G30S), Demokrasi Terpimpin, transisi menuju Orde Baru, dan perkembangan stabilitas nasional.

Tahap kritik sumber dilakukan melalui kritik eksternal untuk menguji autentisitas sumber berdasarkan asal-usul, waktu penerbitan, dan lembaga penerbit, serta kritik internal untuk menilai kredibilitas isi melalui perbandingan antarsumber guna mengidentifikasi konsistensi fakta dan potensi bias. Selanjutnya, tahap interpretasi digunakan untuk menganalisis

keterkaitan antara polarisasi ideologi, rivalitas politik, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika Perang Dingin dalam memengaruhi krisis politik 1965 serta implikasinya terhadap pembentukan stabilitas nasional. Tahap terakhir, historiografi, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi sehingga menghasilkan rekonstruksi historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Politik Indonesia Tahun 1965 dalam Perspektif Sejarah

Berdasarkan analisis terhadap arsip pemerintah, dokumen resmi negara, pidato Presiden Soekarno, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), serta berbagai karya historiografi, penelitian ini menunjukkan bahwa krisis politik Indonesia tahun 1965 merupakan akumulasi konflik politik, ideologi, ekonomi, dan geopolitik yang berkembang sejak awal dekade 1960-an. Dengan demikian, krisis tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S), melainkan sebagai puncak dari ketegangan struktural yang telah berlangsung pada masa Demokrasi Terpimpin.

Pada periode tersebut, Presiden Soekarno berupaya mempertahankan keseimbangan politik melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Namun, implementasi konsep tersebut justru memperlihatkan meningkatnya rivalitas antara Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok-kelompok politik lainnya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Herbert Feith yang menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin ditandai oleh polarisasi politik yang semakin tajam sehingga memperlemah stabilitas pemerintahan. Persaingan antarelit tersebut semakin diperburuk oleh memburuknya kondisi ekonomi nasional, yang ditandai dengan inflasi sangat tinggi, menurunnya produksi, serta meningkatnya beban fiskal negara. Kondisi tersebut memperbesar ketidakpuasan masyarakat dan memperlemah legitimasi pemerintah.

Selain faktor domestik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia tidak terlepas dari konteks geopolitik global pada masa *Cold War*. Posisi Indonesia sebagai negara strategis di Asia Tenggara menempatkannya dalam persaingan pengaruh antara blok Barat dan blok Timur. Situasi tersebut memperkuat kompleksitas konflik politik nasional karena dinamika politik dalam negeri berlangsung bersamaan dengan meningkatnya rivalitas ideologis pada tingkat internasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis politik 1965 merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi.

Gerakan 30 September 1965 sebagai Puncak Krisis Politik

Analisis terhadap berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik kulminasi dari konflik politik yang telah berkembang sebelumnya. Peristiwa tersebut ditandai dengan penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi serta seorang perwira pertama Angkatan Darat yang kemudian memicu perubahan besar dalam konfigurasi politik Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peristiwa G30S masih menjadi salah satu isu paling diperdebatkan dalam historiografi Indonesia karena terdapat beragam interpretasi mengenai aktor, motif, dan rangkaian peristiwanya.

Sejumlah sumber resmi pada masa Orde Baru menempatkan PKI sebagai aktor utama di balik G30S, sedangkan berbagai penelitian setelah era Reformasi menawarkan interpretasi yang lebih kompleks dengan menyoroti keterlibatan berbagai aktor politik, militer, maupun faktor internasional. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa penjelasan mengenai G30S tidak dapat disederhanakan menjadi satu narasi tunggal, melainkan harus dipahami melalui pendekatan historiografi yang kritis terhadap sumber-sumber sejarah.

Terlepas dari perdebatan mengenai aktor utama, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak politik G30S jauh melampaui peristiwa itu sendiri. Setelah G30S, TNI Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pengendalian keamanan nasional melalui serangkaian kebijakan politik dan militer. Perubahan tersebut diikuti oleh pembubaran PKI, penangkapan massal, pembersihan politik, serta restrukturisasi lembaga-lembaga negara yang kemudian mengubah konfigurasi kekuasaan nasional. Dengan demikian, G30S tidak hanya menjadi krisis keamanan, tetapi juga menjadi momentum transformasi politik yang menandai peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru.

Dalam perspektif sejarah politik, temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis politik dapat berfungsi sebagai titik balik (*critical juncture*) yang mengubah distribusi kekuasaan dan arah perkembangan negara. Oleh karena itu, G30S tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai momentum historis yang membentuk konfigurasi politik Indonesia pada dekade-dekade berikutnya.

Peralihan Kekuasaan dan Lahirnya Orde Baru

Analisis terhadap berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa krisis politik tahun 1965 menjadi momentum penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Setelah peristiwa G30S, posisi politik Soekarno mengalami pelemahan seiring menurunnya dukungan dari TNI Angkatan Darat dan sebagian besar kekuatan politik nasional. Situasi tersebut mencapai titik penting ketika diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Supersemar menjadi dasar politik yang mempercepat proses konsolidasi kekuasaan Soeharto. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah melakukan pembubaran PKI, restrukturisasi lembaga-lembaga negara, serta konsolidasi dukungan politik yang pada akhirnya mengantarkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa transisi menuju Orde Baru tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi merupakan proses politik yang berkembang secara bertahap sebagai respons terhadap krisis nasional. Dalam perspektif sejarah politik, perubahan rezim tersebut menunjukkan bahwa krisis politik dapat menjadi *critical juncture* yang mengubah distribusi kekuasaan sekaligus membentuk konfigurasi politik baru. Sejalan dengan hal tersebut, Orde Baru membangun legitimasi pemerintahannya dengan menempatkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai agenda utama pemerintahan.

Implikasi Krisis Politik 1965 terhada Stabilitas Nasional

1. Stabilitas Politik

Salah satu implikasi utama dari krisis politik 1965 adalah terbentuknya sistem politik yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Orde Baru berhasil

mengurangi konflik politik terbuka melalui penyederhanaan partai politik dan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik masyarakat. Dari sisi positifnya, kondisi tersebut memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan nasional secara lebih terarah. Namun, stabilitas politik tersebut juga disertai dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pembatasan oposisi politik, dan berkurangnya ruang demokrasi. Dengan demikian, stabilitas yang tercipta lebih bersifat stabilitas yang dikendalikan oleh negara.

2. Stabilitas Keamanan

Penelitian ini menemukan bahwa peristiwa 1965 memperkuat posisi militer dalam kehidupan nasional. Melalui konsep Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga berperan dalam bidang sosial dan politik. Kebijakan tersebut dianggap berhasil menjaga kemanan nasional selama beberapa dekade. Konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dapat ditekan melalui kontrol keamanan yang kuat. Akan tetapi, dominasi militer juga menimbulkan berbagai kritik karena dianggap mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pemerintahan.

3. Stabilitas Sosial

Implikasi sosial dari krisis politik 1965 merupakan salah satu dampak yang paling panjang. Banyak individu yang ditangkap, dipenjara, atau mengalami diskriminasi sosial karena dituduh memiliki hubungan dengan PKI. Stigma sosial tersebut tidak hanya dirasakan oleh para korban, tetapi juga oleh anggota keluarga mereka hingga beberapa generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma kolektif akibat peristiwa 1965 masih menjadi bagian dari memori sosial masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarga korban mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari krisis politik dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan dampak politiknya.

4. Stabilitas Ideologi

Krisis politik 1965 juga berdampak pada penguatan ideologi negara. Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai program pendidikan dan sosialisasi ideologi dilakukan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil memperkuat integrasi nasional dan mencegah munculnya konflik ideologi yang berlebihan. Namun di sisi lain, penerapan ideologi negara sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik pemerintah sehingga menimbulkan kritik dari berbagai kalangan akademisi dan aktivis.

5. Analisis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis politik Indonesia tahun 1965 merupakan peristiwa historis yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor penyebab. Analisis terhadap berbagai sumber sejarah memperlihatkan bahwa krisis tersebut merupakan akumulasi interaksi antara polarisasi ideologi, persaingan elite politik, memburuknya kondisi ekonomi, serta pengaruh dinamika Perang Dingin. Dengan demikian, Gerakan 30 September 1965 bukan semata-mata menjadi penyebab krisis, melainkan titik kulminasi dari ketegangan politik yang telah berkembang sejak masa Demokrasi Terpimpin. Temuan ini memperkuat pandangan historiografi bahwa perubahan politik berskala besar

umumnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural dan kontekstual yang saling memengaruhi.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa krisis politik 1965 menjadi *critical juncture* dalam sejarah politik Indonesia karena menandai perubahan mendasar pada struktur kekuasaan dan paradigma penyelenggaraan negara. Transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru tidak hanya mengubah kepemimpinan nasional, tetapi juga melahirkan orientasi baru yang menempatkan stabilitas politik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Paradigma tersebut diwujudkan melalui penguatan peran negara dan militer, restrukturisasi sistem politik, serta peneguhan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa stabilitas yang berhasil dibangun membawa konsekuensi berupa pembatasan ruang demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan terbentuknya trauma sosial yang berlangsung lintas generasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa krisis politik Indonesia tahun 1965 memiliki implikasi yang melampaui perubahan rezim pemerintahan. Peristiwa tersebut membentuk arah perkembangan sistem politik Indonesia, memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat, serta membangun paradigma stabilitas nasional yang mewarnai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap krisis politik 1965 menjadi penting, tidak hanya untuk memperkaya historiografi Indonesia, tetapi juga sebagai refleksi historis dalam memperkuat demokrasi, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga integrasi nasional pada masa kini.

SIMPULAN

Krisis politik Indonesia tahun 1965 merupakan hasil akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi konflik antarelit politik, polarisasi ideologi, kemerosotan kondisi ekonomi, dan dinamika geopolitik pada masa Perang Dingin. Akumulasi faktor-faktor tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia melalui peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Perubahan tersebut diikuti oleh restrukturisasi sistem politik, penguatan peran militer dalam pemerintahan, serta penataan kembali kehidupan politik yang berorientasi pada stabilitas nasional sebagai landasan pembangunan.

Implikasi krisis politik 1965 tidak hanya tampak pada perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga mencakup aspek politik, keamanan, sosial, dan ideologi. Stabilitas nasional yang terbentuk pada masa Orde Baru berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, namun juga diiringi dengan pembatasan ruang demokrasi, menguatnya dominasi militer, munculnya trauma kolektif, serta menguatnya Pancasila sebagai dasar negara dan instrumen integrasi nasional. Dengan demikian, krisis politik 1965 merupakan peristiwa historis yang membentuk arah perkembangan politik Indonesia modern sekaligus memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara stabilitas nasional, demokrasi, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu terus mendorong penguatan rekonsiliasi nasional melalui pendekatan yang

berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedua, lembaga pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran sejarah mengenai peristiwa 1965 secara kritis, objektif, dan berbasis pada beragam sumber sejarah agar mampu menumbuhkan kemampuan berpikir historis dan kesadaran sejarah peserta didik. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memanfaatkan sumber-sumber primer yang lebih beragam, seperti arsip, sejarah lisan, maupun dokumen internasional, serta mengintegrasikan pendekatan multidisipliner untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik Indonesia tahun 1965 beserta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

Bourchier, D. (2015). *Illiberal democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Routledge.

Cribb, R. (Ed.). (1990). *The Indonesian killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali*. Monash University, Centre of Southeast Asian Studies.

Crouch, H. (1978). *The army and politics in Indonesia*. Cornell University Press.

Feith, H. (2007). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.

Gottschalk, L. (1969). *Understanding history: A primer of historical method* (2nd ed.). Alfred A. Knopf.

Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2022). Segitiga kekuasaan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965: Sukarno, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal, 6*(2), 161-180.

Heryanto, A. (1999). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.

Maksum, A., & Bustami, R. (2014). The 1965 coup and Reformasi 1998: Two critical moments in Indonesia–Malaysia relations during and after the Cold War. *SpringerPlus, 3*, Article 45. https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-45

Nurhidayat, W., Kurnia, P. S., Andayasari, M. P., & Ribawati, E. (2024). Krisis ekonomi dan kondisi masyarakat Indonesia tahun 1965-1966. *Sindoro: Cendekia Pendidikan, 5*(3).

Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa Reformasi. *Jurnal Politik Indonesia, 8*(1), 1-15.

Robinson, G. (2017). Down to the very roots: The Indonesian Army's role in the mass killings of 1965-1966. *Journal of Genocide Research, 19*(4), 465-486. https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393935

Robinson, G. (2018). *The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965-66*. Princeton University Press.

Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. University of Wisconsin Press.

Sjamsuddin, H. (2019). *Metodologi sejarah*. Ombak.

Wulandari, T. (2020). Trauma kolektif korban peristiwa 1965 dan rekonsiliasi nasional. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22*(3), 305-320.